

DAMPAK PERUBAHAN POLA RUANG PADA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (KSPNBTS) DI DESA GUBUGKLAKAH DAN DESA NGADAS

Pradipta Wildan Hernanda¹, Arief Setiyawan², Ardiyanto Maksimilianus Gai³

[e-mail: whernanda1975@gmail.com](mailto:whernanda1975@gmail.com)¹, arf_setiyawan@yahoo.com²,
ardy_06pl@yahoo.co.id³

Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang.

Jl. Sigura - Gura No.2, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur, Indonesia.

Abstrak: Di dalam suatu penetapan kawasan sebagai KSPN perlu ditinjau dampak-dampak yang timbul dalam beberapa aspek dan aktivitas warga setempat, kemudian dampak yang timbul harus berkaitan dengan penataan ruang yang sesuai pemanfaatan lahan kawasan tersebut, maka dari itu, hal ini tertuju pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termasuk pada produk tata ruang yang juga produk-produk ini menjadi acuan pada dampak penetapan KSPN pada kawasan perdesaan. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tanggal 31 Maret 2015 melalui Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF) 2015 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru. proses penetapan TNBTS sebagai KSPN dilakukan beberapa pertimbangan antara lain potensi wisata alam yang sangat menarik seperti keindahan Gunung Bromo dan Semeru, keberadaan budaya Tengger yang unik dan kaya, serta aksesibilitas ke kawasan yang memadai. Selain itu, penetapan ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wisata di wilayah Jawa Timur dan mendukung program pembangunan pariwisata nasional. Sebagai KSPN, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di TNBTS diatur lebih terintegrasi dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan berbagai pihak seperti pengusaha, masyarakat, dan akademisi. Penelitian ini terdapat 3 sasaran yaitu identifikasi perubahan pola ruang, identifikasi faktor penyebab perubahan pola ruang desa sebelum dan setelah penetapan KSPN, dan dampak perubahan pola ruang berdasarkan hasil perubahan pola ruang dalam kurun waktu tertentu. Masing-masing sasaran tersebut diselesaikan dengan menggunakan analisa perbandingan keselerasan kebijakan dan overlay peta citra dengan data spasial pola ruang RTRW Kabupaten Malang, kemudian menghasilkan arahan berdasarkan analisa diatas. Dampak dari penetapan suatu kawasan menjadi KSPN berpengaruh pada pemanfaatan ruang serta kesiapan sarana dan prasarana pembangunan yang mendukung lingkungan yang baik, tertata dan sesuai dengan manfaatnya.

Kata-kata Kunci: Kawasan strategis nasional, pola ruang, pariwisata, faktor penyebab, dampak perubahan

THE IMPACT OF CHANGES IN SPATIAL PATTERNS ON THE ESTABLISHMENT OF THE BROMO TENGGER SEMERU NATIONAL TOURISM STRATEGIC AREA (KSPNBTS) IN GUBUGKLAKAH AND NGADAS VILLAGE

Abstract: In a determination of an area as a KSPN, it is necessary to review the impacts that arise in several aspects and activities of local residents, then the impacts that arise must be related to the spatial arrangement that is appropriate for the land use of the area, therefore, this is focused on the Regional Spatial Plan (RTRW) which is included in the spatial product which also these products become a reference to the impact of the determination of KSPN on rural areas. Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) was designated as a National Tourism Strategic Area (KSPN) on March 31, 2015 through the 2015 Decree of the Minister of Tourism and Creative

Economy (PAREKRAF) concerning the Determination of Bromo Tengger Semeru National Tourism Strategic Area. the process of determining TNBTS as a KSPN was carried out several considerations including the potential for very attractive natural tourism such as the beauty of Mount Bromo and Semeru, the existence of a unique and rich Tengger culture, and adequate accessibility to the area. In addition, this determination was also made to optimize tourism potential in the East Java region and support the national tourism development program. As a KSPN, the management and development of tourist areas in the TNBTS is more integrated and coordinated by the central and local governments and involves various parties such as entrepreneurs, communities, and academics. This research has 3 targets, namely the identification of changes in spatial patterns, identification of factors causing changes in village spatial patterns before and after the establishment of KSPN, and the impact of changes in spatial patterns based on the results of changes in spatial patterns within a certain period of time. Each of these targets is completed by using a comparative analysis of policy alignment and overlaying image maps with spatial data on the spatial pattern of the Malang Regency RTRW, then producing directions based on the above analysis. The impact of determining an area to be a KSPN affects the use of space and the readiness of development facilities and infrastructure that support a good, orderly environment and in accordance with its benefits.

Keywords: National strategic area, spatial pattern, tourism, causal factors, impact of change.

PENDAHULUAN

Didalam suatu penetapan kawasan sebagai KSPN perlu ditinjau dampak-dampak yang timbul dalam beberapa aspek dan aktivitas warga setempat, kemudian dampak yang timbul harus berkaitan dengan penataan ruang yang sesuai pemanfaatan lahan kawasan tersebut, maka dari itu, hal ini tertuju pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termasuk pada produk tata ruang yang juga produk-produk ini menjadi acuan pada dampak penetapan KSPN pada kawasan perdesaan.

(Syafei & Hamdani, 2016) Perencanaan pembangunan di desa selama ini belum menyentuh aspek tata ruang, karena seringkali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak didasarkan pada potensi yang ada. Desa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti saat ini, misalnya rusaknya ekosistem pertanian dan hutan yang diikuti dengan semakin meningkatnya beban pembangunan untuk menjamin keberlanjutan dan lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk yang semakin padat. Desa, semakin terbuka terhadap perkotaan dan semakin rentan terhadap sumber daya alam. Untuk memastikan keberlanjutan penghidupan (sustainable livelihood). Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tanggal 31 Maret 2015 melalui Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF) No.KM.77/HK.307/MPEK/2015 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru. Proses penetapan TNBTS sebagai KSPN dilakukan beberapa pertimbangan antara lain potensi wisata alam yang sangat menarik seperti keindahan Gunung Bromo dan Semeru, keberadaan budaya Tengger yang unik dan kaya, serta aksesibilitas

Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo merupakan wilayah desa otonom yang berpenduduk 7.039 jiwa yang terdiri dari 3.526 penduduk laki-laki dan 3.315 penduduk perempuan. Potensi-potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) perlu terus digali dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Secara umum potensi Desa Poncokusumo dapat digambarkan dalam berbagai aspek, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai penghubung kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penetapan suatu kawasan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan?
2. Bagaimana efek penetapan kawasan sebagai KSPN bisa merubah aktivitas pola hidup masyarakat setempat?
3. Bagaimana karakteristik perubahan ekonomi masyarakat setempat sehingga tidak lagi memperhatikan kelestarian lingkungannya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan pola ruang pada kawasan perdesaan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kemudian meneliti dan mengidentifikasi perubahan pola ruang yang sesuai serta meneliti bahwa dampak tersebut berpengaruh perubahan presentase pada dua desa didalam TNBTS sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai KSPN. Pada aspek-aspek tersebut mencakup dalam perubahan pola ruang, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat teridentifikasi dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

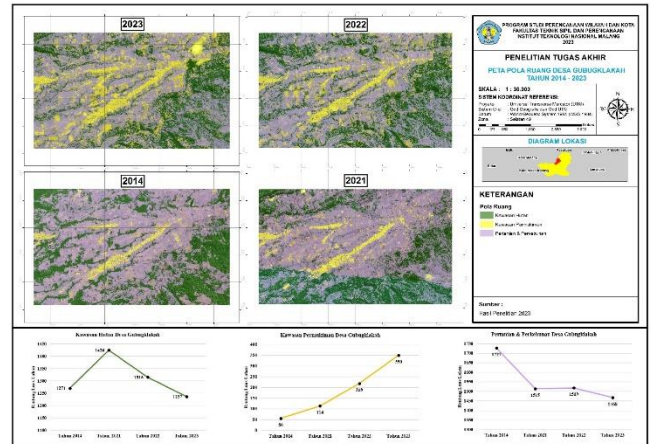
Dalam penelitian Dampak Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru Terhadap Perubahan Pola Ruang Disekitar Kawasan Perdesaan Gubugklakah dan Ngadas tahapan pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah dengan melakukan observasi langsung dilapangan untuk memperoleh gambaran secara actual pada lokasi penelitian, yang berupa informasi dan data primer yang berkaitan dengan kondisi eksisting di wilayah penelitian merupakan jenis penelitian metode campuran, yaitu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif dilakukan pada analisa spasial dan analisis kualitatif dilakukan pada analisis faktor penyebab dengan mengaktegorisasi data menggunakan aplikasi NVIVO. Untuk langkah penelitian yang pertama melakukan identifikasi perubahan pola ruang di dua desa sebelum dan sesudah ditetapkannya Kecamatan Poncokusumo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPNBTS) menggunakan perbandingan melalui overlay pada peta dan alat yang digunakan yaitu ArcGis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu identifikasi faktor penyebab perubahan pola ruang di dua desa akibat perubahan pola ruang sebelum dan sesudah ditetapkannya Kecamatan Poncokusumo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPNBTS) menggunakan perbandingan melalui kategorisasi data dengan alat bantu NVIVO. Setelah teridentifikasi perubahan pola ruang melalui overlay data peta dan menghasilkan perubahan peningkatan dan penurunan presentase dan diketahui faktor penyebabnya dengan kategorisasi data, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari penetapan KSPN ini berpengaruh pada aktivitas masyarakat dan perkembangan pola ruangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

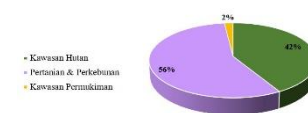
Analisa Perubahan Pola Ruang Desa Gubugklakah

Hasil dilakukan dengan menganalisis perubahan pola ruang di dua desa yang menjadi objek penelitian, yakni Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas. Pada kelas pola ruang yang diteliti terdiri dari kawasan hutan, kawasan permukiman, dan kawasan perkebunan dan pertanian. Untuk perbandingan perubahannya dilihat dari rentang tahun mulai 2023, 2022, 2021, dan tahun 2014. Perbandingan dilakukan di tahun 2014 karena di tahun ini dua desa tersebut masih belum ada penetapan terkait KSPNBTS sehingga bisa terlihat

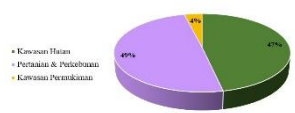
perubahan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah adanya penetapan KSPNBTS di kawasan pedesaan dan adanya peta dan grafik dari tahun 2014 sampai tahun 2023 bisa terlihat di bagian apa yang berubah dalam rentang waktu 4 tahun tersebut. Setelah teridentifikasi maka menimbulkan yang namanya trend perkembangan pola ruang desa. Berikut merupakan peta dan grafik perubahan pola ruang di Desa Gubugklakah.



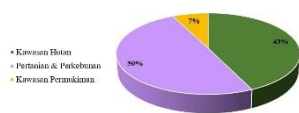
Pola Ruang Desa Gubugklakah Tahun 2014



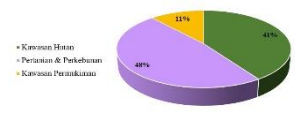
Pola Ruang Desa Gubugklakah Tahun 2021



Pola Ruang Desa Gubugklakah Tahun 2022



Pola Ruang Desa Gubugklakah Tahun 2023



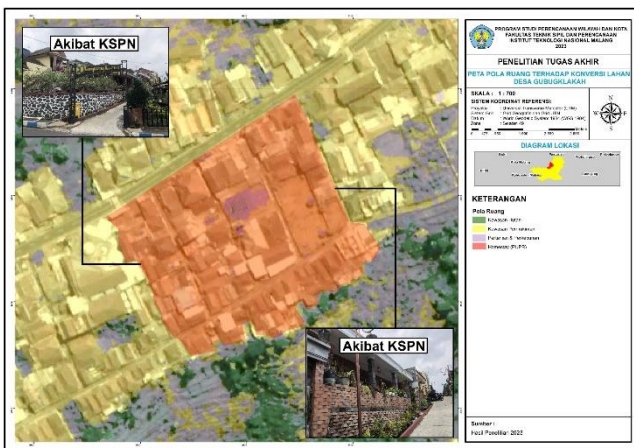
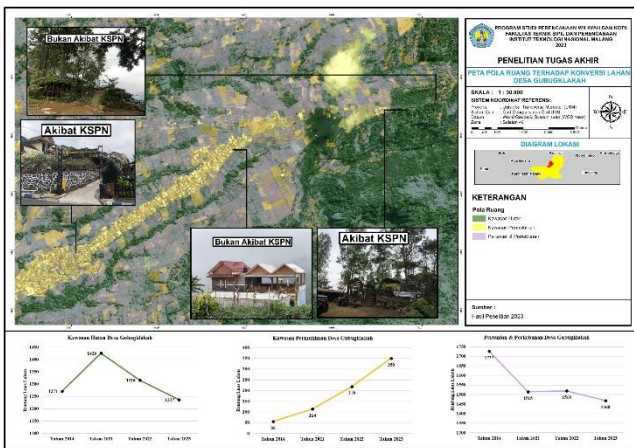
Pembahasan

Berdasarkan peta dan grafik diatas disebutkan pada beberapa aspek pola ruang Desa Gubugklakah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kawasan permukiman, mulai dari 2014 kawasan permukiman sebesar 2% dari total luas lahan, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 4%, di tahun 2022 meningkat menjadi 7% dan di tahun sekarang 2023 mencapai 11% dari total luas lahan desa. Begitu juga dengan kelas pola ruang lainnya yaitu kawasan hutan dan kawasan pertanian dan perkebunan. Terlihat pada tahun 2014 hingga tahun 2023 kawasan hutan mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, dan presentase paling besar terdapat di tahun 2021 sebesar 47% dari total luas lahan desa. Dan kelas pola ruang yang terakhir yakni kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan ini memiliki luas lahan dan presentasi yang paling besar diantara dua kelas pola ruang lainnya. Pada grafik diatas disebutkan dari tahun 2014 sampai 2023 kawasan pertanian dan

perkebunan di Desa Gubugklakah mencapai paling tinggi di tahun 2014 sebesar 56% dari total luas lahan desa merupakan kawasan pertanian dan perkebunan, sehingga adanya komoditas pertanian dan perkebunan di desa ini menimbulkan potensi yang besar bagi pendapatan desa.

Identifikasi Dampak KSPN Desa Gubugklakah

Pada analisis perubahan pola ruang perlu dilakukan adanya identifikasi dampak dari penetapan KSPN di Desa Gubugklakah dari perubahan konversi lahan apa saja yang terjadi dari adanya KSPN, seperti contoh di Desa Gubugklakah terdapat 3 kelas pola ruang, yaitu kawasan hutan, kawasan permukiman dan kawasan perkebunan, maka di identifikasi apakah terdapat adanya konversi lahan akibat dan KSPN dan mana yang bukan akibat dari KSPN. Berikut merupakan peta hasil identifikasi dampak tersebut.



Berdasarkan hasil peta di atas bisa dijelaskan bahwa perubahan pada konversi lahan terjadi pada beberapa aspek pembangunan yaitu. Adanya pembangunan homestay yang dibangun akibat adanya penetapan KSPN dan ada pembangunan homestay yang bukan akibat dari penetapan KSPN. Dampak dari pembangunan akibat KSPN yakni dengan terbantunya renovasi tempat tinggal warga setempat yang diikuti sertakan program dari Kementerian PUPR yang

bernama program SARHUNTA (Sarana Hunian Pariwisata), program ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas pariwisata setempat yaitu wisata Gunung Bromo yang dimana dengan melakukan bantuan merenovasi tempat tinggal warga menjadi homestay dan mekanisme penyewaan akomodasi diatur secara menyeluruh oleh pemilik rumah sendiri sehingga hal ini dapat meningkatkan kondisi ekonomi warga sekitar. Kemudian untuk pembangunan homestay yang diluar dari program SARHUNTA lebih dominan dilakukan oleh pendatang yang investasi dengan cara membangun homestay di Desa Gubugklakah dan semua pembangunan homestay ini rata-rata dibangun di lahan perkebunan dan pertanian, sehingga dapat terlihat pada kenaikan presentase perubahan pola ruang Desa Gubugklakah. Kemudian dengan adanya pembangunan kafe di Desa Gubugklakah juga termasuk dalam dampak dari penetapan KSPN dan juga terdapat yang bukan akibat dari penetapan KSPN di kawasan Desa Gubugklakah. Untuk kafe yang termasuk dalam akibat dampak penetapan KSPN adalah kafe Amour yang terletak di perbatasan antara Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas, kafe ini disebut termasuk dalam akibat penetapan KSPN yaitu karena kafe ini merupakan salah satu program rencana dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk membantu meningkatkan kegiatan pariwisata serta meningkatkan aspek ekonomi bagi warga Desa Gubugklakah. Kemudian untuk pembangunan kafe yang tidak termasuk dalam akibat dari dampak penetapan KSPN yaitu kafe lodji, kafe lodji sendiri terletak berdekatan dengan kafe amour, kafe ini tidak termasuk dari akibat dari KSPN karena kafe ini dibangun karena kesepakatan warga sendiri dan kafe ini termasuk yang mengawali timbulnya kafe kafe lainnya, kafe ini dibangun dengan tujuan untuk membantu aspek ekonomi warga Desa Gubugklakah sendiri.

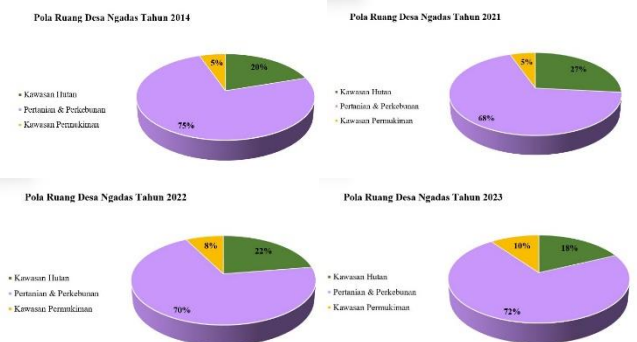
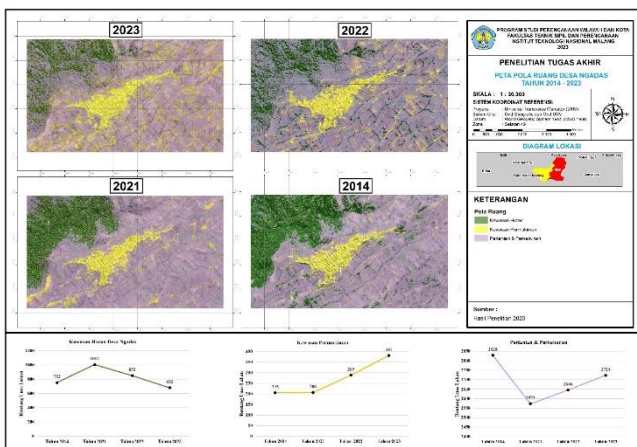
Desa Gubugklakah				
Kategori	Jenis Bangunan	Jumlah Total Bangunan	Jumlah Bangunan	Presentase (%)
Bangunan Tidak Terdampak KSPN	Homestay	970	20	2,1
	Kafe		18	1,9
Bangunan Terdampak KSPN	Homestay	970	66	7
	Kafe		2	0,2

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan terdampak}}{\text{Total Bangunan}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas bisa dijelaskan bahwa hanya ada 2 kategori bangunan yang dapat dihitung presentase akibat dampak dari penetapan KSPN dan buka KPSN yaitu homestay dan kafe, dikarenakan 2 kategori bangunan ini yang terdampak.

Analisa Perubahan Pola Ruang Desa Ngadas

Pada perubahan pola ruang di Desa Ngadas paling dominan ke arah pertanian dan perkebunan dikarenakan pembangunan di desa ini tidak bisa sembarangan, hanya warga asli desa yang bisa membangun di desa ini. Pada kelas pola ruang yang diteliti terdiri dari kawasan hutan, kawasan permukiman, dan kawasan perkebunan dan pertanian. Untuk perbandingan perubahannya dilihat dari rentang tahun mulai 2023, 2022, 2021, dan tahun 2014. Perbandingan dilakukan di tahun 2014 karena di tahun ini dua desa tersebut masih belum ada penetapan terkait KSPNBTS sehingga bisa terlihat perubahan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah adanya penetapan KSPNBTS di kawasan pedesaan dan adanya peta dan grafik dari tahun 2014 sampai tahun 2023 bisa terlihat di bagian apa yang berubah dalam rentang waktu 4 tahun tersebut. Setelah teridentifikasi maka menimbulkan yang namanya trend perkembangan pola ruang desa. Berikut merupakan peta dan grafik perubahan pola ruang di Desa Ngadas.



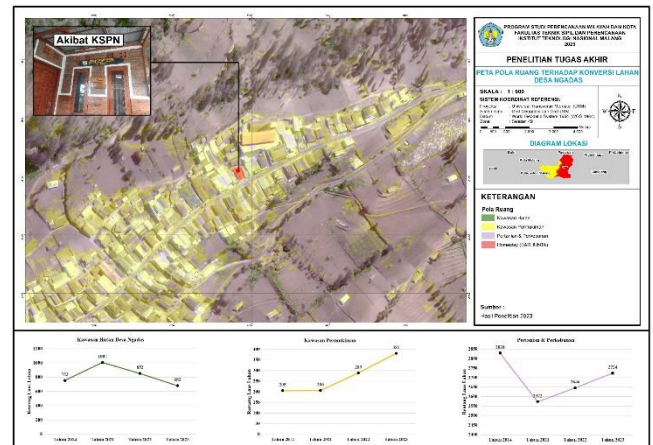
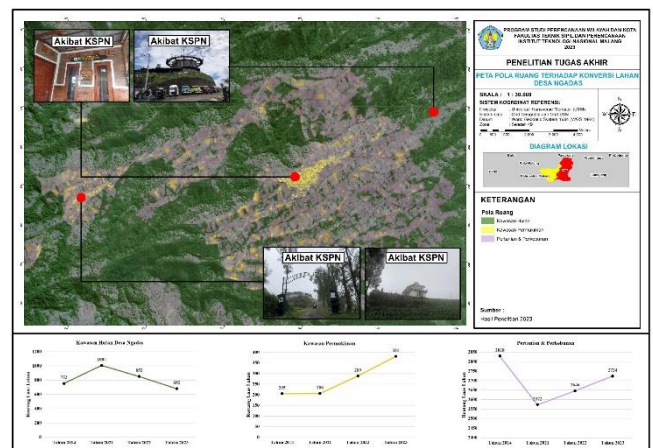
Pembahasan

Berdasarkan peta dan grafik diatas disebutkan pada beberapa aspek pola ruang Desa Ngadas terjadi peningkatan yang signifikan dalam kawasan permukiman, mulai dari 2014 hingga tahun 2021 kawasan permukiman sebesar 5% dari total luas lahan, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 8%, dan di

tahun sekarang 2023 mencapai 10% dari total luas lahan desa. Begitu juga dengan kelas pola ruang lainnya yaitu kawasan hutan dan kawasan pertanian dan perkebunan. Terlihat pada tahun 2014 hingga tahun 2023 kawasan hutan mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, dan presentase paling besar terdapat di tahun 2022 sebesar 22% dari total luas lahan desa. Dan kelas pola ruang yang terakhir yakni kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan ini memiliki luas lahan dan presentasi yang paling besar diantara dua kelas pola ruang lainnya. Pada grafik diatas disebutkan dari tahun 2014 sampai 2023 kawasan pertanian dan perkebunan di Desa Ngadas mencapai paling tinggi di tahun 2014 sebesar 75% dari total luas lahan desa merupakan kawasan pertanian dan perkebunan, sehingga adanya komoditas pertanian dan perkebunan di desa ini

Identifikasi Dampak KSPN Desa Ngadas

Pada analisis perubahan pola ruang perlu dilakukan adanya identifikasi dampak dari penetapan KSPN di Desa Ngadas dari perubahan konversi lahan apa saja yang terjadi dari adanya KSPN, seperti contoh di Desa Ngadas terdapat 3 kelas pola ruang, yaitu kawasan hutan, kawasan permukiman dan kawasan perkebunan, maka di identifikasi apakah terdapat adanya konversi lahan akibat dan KSPN dan mana yang bukan akibat dari KSPN. Berikut merupakan peta hasil identifikasi dampak tersebut.



Berdasarkan hasil peta di atas bisa dijelaskan bahwa perubahan pada konversi lahan terjadi pada beberapa aspek pembangunan yaitu. Adanya pembangunan homestay yang dibangun akibat adanya penetapan KSPN dan ada pembangunan homestay yang bukan akibat dari penetapan KSPN. Dampak dari pembangunan akibat KSPN yakni dengan terbantunya renovasi tempat tinggal warga setempat yang diikuti sertakan program dari Kementerian PUPR yang bernama program SARHUNTA (Sarana Hunian Pariwisata), program ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas pariwisata setempat yaitu wisata Gunung Bromo yang dimana dengan melakukan bantuan merenovasi tempat tinggal warga menjadi homestay dan mekanisme penyewaan akomodasi diatur secara menyeluruh oleh pemilik rumah sendiri sehingga hal ini dapat meningkatkan kondisi ekonomi warga sekitar. Kemudian untuk pembangunan homestay yang diluar dari program SARHUNTA lebih dominan dilakukan oleh pendatang yang investasi dengan cara membangun homestay di Desa Ngadas dan semua pembangunan homestay ini rata-rata dibangun di lahan perkebunan dan pertanian, sehingga dapat terlihat pada kenaikan presentase perubahan pola ruang Desa Ngadas.

Kemudian dengan adanya pembangunan kafe 360 di Desa Ngadas juga termasuk dalam dampak dari penetapan KSPN di kawasan Desa Ngadas, kafe ini dibangun dengan tujuan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung dan dampak positif dari adanya kafe ini adalah masyarakat setempat terbantu dalam aspek ekonomi karena sebesar 90% warga Desa Ngadas bekerja di kafe 360 dan lahan parkir di kafe ini dikelola oleh BUMDES Desa Ngadas. Bangunan kafe ini terletak pada kawasan hutan Desa Ngadas sehingga hal ini menyebabkan perubahan pola ruang akibat dari dampak penetapan KSPN di kawasan Desa Ngadas.

Kemudian adanya jalur alternatif di Dusun Jarak Ijo juga merupakan dampak akibat adanya penetapan KSPN di Desa Ngadas, hal demikian disebabkan karena jalur alternatif merupakan jalur baru yang mengakses langsung ke wisata Gunung Bromo yang pintu keluarnya berada di Jemplang langsung, hal ini dapat menguntungkan wisatawan maupun warga Desa Ngadas dikarenakan untuk menuju Wisata Gunung Bromo tidak perlu melewati Desa Ngadas.

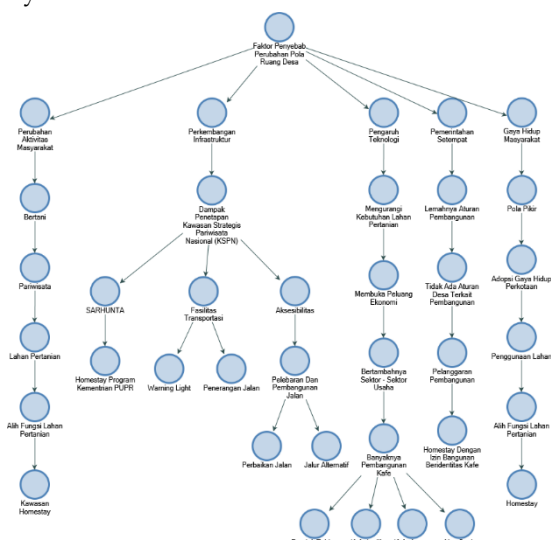
Desa Ngadas				
Kategori	Jenis Bangunan	Jumlah Total Bangunan	Jumlah Bangunan	Presentase (%)
Bangunan Tidak Terdampak KSPN	Homestay	489	30	6,1
	Kafe		0	0,0
Bangunan Terdampak KSPN	Homestay		65	13
	Kafe		1	0,2

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan terdampak}}{\text{Total Bangunan}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas bisa dijelaskan bahwa hanya ada 2 kategori bangunan yang dapat dihitung presentase akibat dampak dari penetapan KSPN dan buka KPSN yaitu homestay dan kafe, dikarenakan 2 kategori bangunan ini yang terhitung terkena dampaknya.

Analisis Faktor Penyebab

Analisa faktor penyebab Desa Gubugklakah dilakukan dengan mengkategorisasi data-data terkait faktor penyebab dari perubahan pola ruang itu sendiri. Analisis ini membantu untuk menjawab sasaran 1 di penelitian ini, untuk menentukan faktor-faktor penyebab peneliti menggunakan berdasarkan kondisi eksisting dan hasil survey lapangan, untuk mengkategorisasi faktor-faktor penyebab perubahan pola ruang Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas menggunakan metode content analysis dan menggunakan alat analisa yaitu NVIVO. Alat ini adalah aplikasi kualitatif yang berguna untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data kualitatif dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen lainnya.



Berdasarkan hasil kategorisasi faktor penyebab perubahan pola ruang di dua desa yaitu Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab yaitu :

1. Perubahan aktivitas masyarakat, aktivitas masyarakat desa lebih dominan mengarah pada bertani kemudian karena semakin banyaknya aktivitas pariwisata maka masyarakat beralih kedalam aktivitas pariwisata seperti semakin banyaknya paguyuban mobil jeep untuk mendukung kegiatan pariwisata dan semakin banyaknya warga yang mengalih fungsikan lahan pertanian mereka menjadi homestay, maka dari itu perubahan aktivitas masyarakat termasuk dalam faktor penyebab perubahan pola ruang desa.
2. Perkembangan infrastruktur, perkembangan

infrastruktur desa terjadi karena dilakukan untuk mendukung adanya penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di kawasan pedesaan, pada penetapan ini menimbulkan hal yang menjadi faktor penyebab perubahan pola ruang yaitu adanya program Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA) yang isi program ini adalah dengan membantu masyarakat desa untuk merenovasi tempat tinggal warga menjadi hunian yang lebih layak dan dapat difungsikan sebagai homestay untuk dapat meraih keuntungan dalam aspek ekonomi, untuk pembangunan homestay ini ada beberapa yang menggunakan lahan warga sendiri yang pada awalnya lahan tersebut merupakan lahan pertanian, sehingga hal ini dapat terhitung dalam faktor penyebab perubahan pola ruang.

3. Pengaruh Teknologi, pengaruh teknologi berdampak pada meningkatnya informasi dari luar desa seperti sosial media yang menyebabkan para warga desa memanfaatkan potensi yang ada di desa seperti keindahan alam untuk akhirnya membangun kafe yang dapat meraih keuntungan dalam aspek ekonomi, kemudian lahan kafe-kafe ini dibangun pada lahan yang sebelumnya merupakan kawasan hutan dan kawasan pertanian, sehingga hal ini dapat disebut dengan perubahan pola ruang desa.

4. Pemerintahan setempat, hal ini dapat disebut dalam salah satu faktor penyebab perubahan pola ruang dikarenakan lemahnya aturan pembangunan di desa yang mengakibatkan pembangunan di desa semakin liar dan tidak ada pengawasan lebih sehingga bermunculan pembangunan-pembangunan baru dengan tidak adanya pengendalian tata ruangnya, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya peraturan desa setempat yang mengatur terkait pembangunan sehingga banyaknya homestay yang dibangun dengan surat izin bangunan beridentitas sebagai kafe.

5. Gaya hidup masyarakat, pada faktor ini disebutkan karena gaya hidup masyarakat dapat mengubah pola pikir masyarakat desa yang mengadopsi gaya hidup di perkotaan seperti banyaknya warga desa yang mengalih fungsikan lahan pertanian mereka sendiri menjadi kawasan homestay dengan alasan untuk meraih keuntungan ekonomi, hal ini termasuk dalam faktor penyebab perubahan pola ruang desa karena setiap pembangunan desa dapat mengurangi lahan pertanian, sehingga jika ditinjau dari peningkatan dan penurunan presetase pola ruang desa dapat terlihat dan gaya hidup pola pikir masyarakat yang menjadi faktor penyebabnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kawasan strategis pariwisata nasional di kawasan pedesaan memberikan potensi besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Melalui pengembangan infrastruktur pariwisata yang tepat dan pelestarian kearifan lokal, kawasan pedesaan dapat menjadi destinasi wisata unik yang menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata, akan terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal serta peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, pariwisata pedesaan juga dapat mendorong pelestarian alam dan budaya, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas lokal dan memperkaya pengalaman wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di kawasan pedesaan merupakan langkah yang penting dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu mengidentifikasi lebih terkait pengendalian tata ruang di Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas, dikarenakan di desa ini pembangunan masih belum ada ketentuan dari peraturan desa yang mengatur tentang adanya pembangunan dan perizinan lebih di perhatikan pada bangunan perdagangan dan jasa di sekitar desa karena ada beberapa kafe yang mempunyai izin yang berbeda dengan kondisi eksistingnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan baru di desa harus sesuai prosedur ketentuan bangunan dan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya Desa Gubugklakah dan Desa Ngadas terlebih di Desa Ngadas yang mempunyai aturan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 108-117.
- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 108-117.

Gunawan, R., Aristarchus, P. K., & Margana, M.

(2013). Perancangan Destination Branding Desa Poncokusumo, Malang. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(2).

Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 163-175.

Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2009 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 443-452.

Sasongko, R. W. D. Pengembangan Desa Wisata Tengger. Jakad Media Publishing.

Sukamara, N., Putra, I. G. P. A., Santhyasa, I. K. G., Wirawan, K., Arimbawa, W., Juliarthana, I. N. H., ... & Kurniawan, W. D. W. (2021). *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*.

Tatura, L. S. (2010). Kajian Perubahan Tata Guna Lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo. *Jurnal Inovasi*, 7(01).

Wahono, P., Karyadi, H., Suhartono, S., Prakoso, A., Prananta, R., & Lokaprasida, P. (2017). Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal dalam Mendukung Pengelolaan Wisata di Wilayah Sekitar Gunung Bromo. *CAKRAWALA*, 11(2), 195-216.

Wirayasa, N. M. A., Preantjaya, W. P., & Warsika, D. (2018). Analisis Kelembagaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 6(1), 105-110.

Zuhri, M. (2012). Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 485-495.

Kebijakan

NASIONAL, B. P. H. PENELITIAN HUKUM TENTANG KONSISTENSI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.

Pupr, K. E. M. E. N. T. E. R. I. A. N. (2019). Dukungan masif infrastruktur PUPR untuk lima destinasi pariwisata super prioritas.